

Evaluasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Nadia Aulia Nanda¹ Lilis Suriani²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
nadiaauliananda@student.uir.ac.id lilissuriani@soc.uir.ac.id

Received : August 13, 2024;

Accepted : 20 August 2024

Abstract

The problem of poverty continues to increase every year and becomes a problem in almost all regions. The BST policy as a program for poverty alleviation still has many challenges, one of which is the distribution mechanism. The purpose of this study was to evaluate the Cash Social Assistance (BST) Policy in Langgini Village, Bangkinang District, Kampar Regency and its inhibiting factors. This research method is quantitative by distributing questionnaires to respondents, and the data is analyzed using quantitative descriptive. The results of the study show that: 1) The overall policy evaluation results are quite good. The community considers the value of this BST assistance to be relatively small and is only supportive and cannot be used as an economic mainstay, so that people who receive BST are not immediately free from poverty. This policy is efficient, because when the budget goes down from the center to the regions and to Langgini Village, these funds will be distributed directly to the recipients. The amount of budget available for this BST program has not been able to cover all the poor people there. Every community that has not received assistance but has been recorded in the DTKS will be prioritized to be given assistance in the next budget year. Both community elements and employees support this assistance program.

Key Words : Policy Evaluation, BST, Langgini Village

Abstrak

Permasalahan kemiskinan terus meningkat setiap tahunnya menjadi permasalahan hampir di seluruh daerah. Kebijakan BST sebagai sebuah program untuk pengentasan kemiskinan masih memiliki banyak tantangan salah satunya mulai dari mekanisme pendistribusian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, dan datanya dianalisis dengan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hasil Evaluasi kebijakan secara keseluruhan tergolong cukup baik. Masyarakat beranggapan nilai bantuan BST ini relatif kecil dan sifatnya hanya mendukung saja dan tidak dapat dijadikan tumpuan ekonomi, sehingga masyarakat yang mendapat BST tidak langsung terbebas dari kemiskinan. Kebijakan ini sudah efisien, karena saat anggaran turun dari pusat ke daerah dan ke Kelurahan Langgini, maka dana ini akan langsung dibagikan kepada penerima. Jumlah anggaran yang tersedia untuk program BST ini belum dapat mencakupi untuk membantu seluruh masyarakat miskin yang ada. kebijakan Bantuan Sosial terdiri dari minimnya kualitas pendataan dan belum efisiennya jumlah dana yang diberikan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat.

KataKunci:EvaluasiKebijakan,BST,KelurahanLanggini

Pendahuluan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial merupakan salah satu wujud nyata upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dalam Permensos ini bantuan sosial didefinisikan sebagai bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Kelurahan Langgini dengan luas wilayah 22,65 km² memiliki 14.119 jiwa penduduk yang menyebabkan kelurahan ini menjadi kelurahan terpadat dengan terdapat 623 jiwa penduduk untuk setiap 1 km² nya. Tingkat kepadatan suatu penduduk dapat meningkatkan resiko kemiskinan yang lebih besar karena tingkat persaingan pekerjaan, keterbatasan lahan, modal yang tinggi menyebabkan suatu daerah yang padat penduduk akan menghasilkan kemiskinan yang juga tinggi. Maka dari itu BST di Kelurahan Langgini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bantuan yang disediakan pemerintah untuk mengatasi dan menanggulangi kemiskinan di setiap daerah.

Sumber dana BST di Kelurahan Langgini berasal dari APBN tahun 2020 di Kelurahan Langgini mendapatkan bantuan untuk BST dari APBN sebesar Rp.366.000.000. Dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 tahun 2020 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020, menyebutkan pasal 2 ayat (2) tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah tambahan bantuan kelurahan yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Besaran dana untuk tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa menyebutkan pada pasal 32A ayat (5) besaran BST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BST di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa atau kelurahan yang bersangkutan. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja.

Pengajuan BST tahun 2020 adalah 489 KK, lolos berkas administratif 481 orang sedangkan sisanya tidak lolos pemberkasan karena dokumen administrasi kependudukan berasal dari luar Kelurahan Langgini, verifikasi dan pengajuan yang lolos DTKS dan berhak mendapatkan BST sebanyak 366 orang. Pengajuan BST tahun 2021 adalah 520 KK, lolos berkas administratif 506 orang sedangkan sisanya tidak lolos pemberkasan karena ada dokumen

administrasi kependudukan berasal dari luar Kelurahan Langgini, verifikasi dan pengajuan yang lolos DTKS dan berhak mendapatkan BST sebanyak 219 orang.

Jumlah penerima BST (Bantuan Sosial Tunai) di kelurahan langgini menurun, selain itu di tahun 2020 jumlah nominal yang diterima sebesar Rp.1.800.000,-/ orang selama 3 tahap sehingga mendapatkan Rp.600.000,- untuk satu tahap. Sementara itu, saat ini di tahun 2021 jumlah nominal yang diterima hanya sebesar Rp.600.000,-/ orang selama 3 tahap sehingga mendapatkan Rp.200.000,- untuk satu tahap.

- 1) Pendistribusian BST di kelurahan langgini kurang tepat sasaran, karena masih banyak penerima yang ekonominya tergolong mampu seperti memiliki rumah atas nama sendiri dengan luas ± 150 m² menggunakan lantai ubin, memiliki kebun > 1000 m² dan sumber penghasilan kepala rumah tangga lebih dari 3,5 juta setiap bulannya.
- 2) Terdapat penerima yang mendapatkan bantuan BST sebanyak dua kali berturut-turut. Hal ini disebabkan karena adanya data NIK ganda dimana masyarakat tersebut masih terdaftar sebagai masyarakat di daerah asalnya, namun sudah berdomisili dan mengurus data kependudukan baru di Kelurahan Langgini. Hal ini disebabkan karena yang bersangkutan menggunakan calo untuk mengurus KTP dan KK, sementara salah seorang pegawai Dukcapil mengkonfirmasi bahwa NIK ganda disebabkan karena verifikasi datanya belum update atau ada gangguan jaringan dan secara sistem untuk pindah berkas otomatis (cabut berkas kependudukan yang lama) memerlukan waktu beberapa hari.
- 3) Masih banyak masyarakat miskin di yang sudah lama berdomisili di kelurahan Langgini dokumen kependudukannya masih terdata dari daerah asal (luar Kelurahan Langgini) sehingga tidak memiliki kesempatan mendapatkan BST. Artinya pendataan masyarakat penerima BST oleh pegawai kelurahan Langgini masih buruk, ditambah lagi tidak ada upaya yang dilakukan pihak kantor lurah untuk membantu dan mencari solusi bagi para masyarakat yang KTP dan KK nya masih berasal dari luar daerah ini. Dana BST yang sudah diberikan itu justru digunakan untuk keperluan konsumtif yang sifatnya tidak primer, seperti membeli paket data, menambah cicilan angsuran sepeda motor, dan langsung habis begitu saja. Penerima BST ini dianggap terindikasi nepotisme, karena hampir seluruh keluarga dari perangkat kelurahan yang mendapatkannya.

Tinjauan Pustaka

Konsep Pembangunan Sosial

Menurut Nitto (dalam Sardjo dkk, 2020:140) konsep pembangunan sosial merupakan segala tindakan yang diambil pemerintah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Tindakan yang diambil tersebut tidak hanya terfokus pada bidang-bidang pekerjaan sosial melainkan juga pada bidangbidang pembangunan lain yang lebih luas. Dengan kata lain pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan layanan kepada masyarakat miskin; memberikan jaminan kepada masyarakat supaya tidak jatuh miskin; menyediakan layanan-layanan kepada seluruh masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat; serta isu-isu yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan upaya pemenuhan layanan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

Menurut Hoesein (2014:33) pembangunan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial. Perubahan sosial adalah perubahan- perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan sosial ini menjadi segala

perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat.

Konsep Evaluasi Kebijakan

William N. Dunn (2015:608), memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Pengertian lebih khusus diberikan Nugroho (2016:154), evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan.

Menurut William N Dunn (dalam Nugroho, 2016:155) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria utama yaitu:

- 1) Efektivitas, hal ini berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
- 2) Efisiensi, hal ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
- 3) Kecukupan, hal ini berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, memiliki nilai, dan menciptakan kesempatan. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
- 4) Perataan, hal ini berkaitan dengan adil, memaksimalkan dan kesejahteraan individu. Kesamaan atau perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- 5) Responsivitas, hal ini berkaitan dengan adanya dukungan masyarakat dan memuat nilai kelompok. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan

sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya.

- 6) Ketepatan, hal ini berkaitan dengan hasil kebijakan yang bermanfaat. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Metode

Tipe penelitian ini adalah campuran. Menurut Creswell (2010:5) metode penelitian campuran (mixed) adalah pendekatan penelitian yang menggabung antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Kelebihan dari tipe ini adalah hasil data yang diperoleh lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Langgini beralamatkan di Jl. Jendral A.Yani No 04, Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari Kasi Penyaluran Bantuan Stimulan Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Lurah Langgini, Kasi Kesejahteraan Sosial, 7 orang ketua RT dan RW, lalu 20 orang Masyarakat penerima BST tahun anggaran 2021.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner dan dokumentasi. Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari para responden yang diperlukan dalam penelitian ini berupa hasil kuesioner kepada masyarakat yang mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan sudah tertulis dalam bentuk dokumentasi dan terkadang juga diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Data ini merupakan data yang sudah diolah dan dipublikasikan oleh badan-badan tertentu

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif (analisa data dengan satu variabel) dengan rumus skoring (Sugiyono, 2016:188).

Untuk menghitung masing-masing indikator adalah dengan rumus:

$$\text{Interval} = \text{skor} \times \text{jumlah item penilaian} \times \text{jumlah sampel}$$

$$\text{Skor minimal} = 1 \times 2 \times 30 = 60$$

$$\text{Skor maksimal} = 3 \times 2 \times 30 = 180$$

$$\frac{\text{Skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{Jumlah alternatif jawaban}} = \frac{180 - 60}{3} = 40$$

Diketahui skor minimal adalah 60 dan skor tertinggi 180 dengan interval 40. Sehingga kriteria yang didapat dari setiap indikator adalah dengan ketentuan:

Baik : Apabila indikator pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) mendapatkan skor 141 – 180

Cukup Baik : Apabila indikator pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) skor 101 – 140

Kurang Baik : Apabila efektivitas pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) mendapatkan skor 60 – 100

Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa. Selanjutnya dianalisis secara kuantitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

Untuk menghitung rekapitulasi skor total evaluasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar adalah dengan rumus:

$$\text{Interval} = \text{skor} \times \text{jumlah total item} \times \text{jumlah sampel}$$

$$\text{Skor minimal} = 1 \times 12 \times 30 = 360$$

$$\text{Skor maksimal} = 3 \times 12 \times 30 = 1.080$$

$$\frac{\text{Skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{Jumlah alternatif jawaban}} = \frac{1.080 - 360}{3} = 240$$

Diketahui skor minimal adalah 360 dan skor tertinggi 1.080 dengan interval 240. Sehingga kriteria yang didapat dari rekapitulasi adalah dengan ketentuan:

Baik : Apabila evaluasi kebijakan pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini mendapatkan skor 841 – 1.080

Cukup Baik : Apabila evaluasi kebijakan pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini mendapatkan skor 601 – 840

Kurang Baik : Apabila evaluasi kebijakan pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini mendapatkan skor 360 – 600

Hasil dan Pembahasan

Jenis kelamin responden sebagian besar adalah perempuan, dengan jumlah 20 orang (67%) sedangkan sisanya responden laki-laki dengan jumlah 10 orang (33%). Mayoritas perempuan ini disebabkan karena responden sebagian besar diisi oleh Ibu Rumah Tangga.

Sebagian besar responden berusia 41 – 45 tahun dengan jumlah 10 orang (33%). Sedangkan sisanya berusia 26 – 30 tahun dengan jumlah 7 orang (23%), berusia 31 – 35 tahun dengan jumlah 5 orang (17%), berusia 36 – 40 tahun dengan jumlah 3 orang (10%), dan berusia \geq 46 tahun dengan jumlah 5 orang (17%).

Tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah tamatan SMP dengan jumlah 12 orang (40%). Sedangkan sisanya adalah tamatan SD dengan jumlah 8 orang (27%), tamatan SMA dengan jumlah 6 orang (20%), dan tamatan Sarjana dengan jumlah 4 orang (13%). Karena mayoritas responden dalam penelitian ini adalah rumah tangga miskin sehingga tingkat pendidikannya juga terbatas akibat keterbatasan ekonomi.

Pekerjaan responden yang terbanyak adalah Ibu Rumah Tangga dengan jumlah 9 orang (30%). Sedangkan sisanya adalah buruh dengan jumlah 8 orang (27%), wiraswasta

dengan jumlah 4 orang (13%), petani dengan jumlah 6 orang (20%), dan Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 3 orang (10%). Karena mayoritas responden dalam penelitian ini adalah rumah tangga miskin sehingga tingkat pendidikannya juga terbatas akibat keterbatasan ekonomi. Responden PNS dalam penelitian ini adalah Kasi Penyaluran Bantuan Stimulan Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Lurah Langgini, dan Kasi Kesejahteraan Sosial.

Tabel 1.
Rekapitulasi Hasil Kuesioner

Indikator	Sub Indikator	Pilihan jawaban			Total	Kategori
		B (1)	CB (2)	KB (3)		
Efektivitas	Hasil yang diharapkan	19	8	0	123	Cukup Baik
		57	16	0		
	Hasil yang sesungguhnya dicapai	3	17	7		
		9	34	7		
Efisiensi	Anggaran	23	4	0	146	Baik
		69	8	0		
	Waktu	16	10	1		
		48	20	1		
Kecukupan	Memuaskan kebutuhan	4	10	13	87	Kurang Baik
		12	20	13		
	Memiliki nilai	2	11	14		
		6	22	14		
Perataan	Adil	17	9	1	142	Baik
		51	18	1		
	Memaksimalkan kesejahteraan individu	18	9	0		
		54	18	0		
Respon-sivitas	Dukungan masyarakat	24	3	0	142	Baik
		72	6	0		
	Komitmen pegawai	11	15	1		
		33	30	1		
Ketepatan	Hasil kebijakan bermanfaat	5	13	9	104	Cukup Baik
		15	26	9		
	Tepat sasaran	5	17	5		
		15	34	5		
					744	Cukup Baik

Sumber : Data Olahan, 2023

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan evaluasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar mendapatkan total skor 744 terletak pada interval variabel antara 601 – 840 sehingga tergolong “Cukup Baik”. Hal ini disebabkan karena efektivitas tergolong cukup baik, efisiensi tergolong baik, kecukupan tergolong kurang baik, perataan tergolong baik, responsivitas tergolong baik, dan ketepatan tergolong cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara terkait evaluasi ini, dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Masyarakat kurang sejahtera yang tidak dapat BST itu banyak hal sebenarnya bisa saja mereka sudah termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja. Jadi banyak verifikasi data masyarakat itu dulu yang benar-benar berhak, kan prioritasnya masyarakat yang terdampak kesejahteraannya. Itu hal penting sebenarnya, maka perlu sosialisasi atas BST ini.” (Wawancara Mukhtarudin S.Sos, Staf Seksi Penyaluran Bantuan Stimulan Dinas Sosial Kabupaten Kampar tanggal 22 Juni 2023).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga diperoleh jawaban sebagai berikut: *“BST itu banyak faktor agar sesuai hasil ya. Untuk SDM saya pikir karna ini di tingkat kelurahan jadi sudah pasti ada pendukung, karna mereka kan dibantu juga sama pihak lain, jadi tidak sendiri. Ada juga relawan yang membantu pendataan Selain itu tugas mereka secara umum adalah mendata dan menyalurkan BST itu serta melaporkan secara administrasinya” (wawancara Lurah Langgini, tanggal 22 Juni 2023).”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa bahwa sumber daya manusia di Kelurahan Langgini sudah cukup mencukupi dalam mengimplementasikan BST ini. SDM sangatlah penting dalam mendukung suatu kebijakan, karena pelaksana ini berkaitan dengan jumlah dan kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Secara keseluruhan, ketepatan dalam pemberian BST sangat penting untuk menjaga integritas program, memastikan pengalokasian dana yang tepat, meningkatkan efektivitas bantuan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Dengan menjaga ketepatan dalam identifikasi penerima yang memenuhi syarat dan pemberian bantuan yang akurat, program BST dapat berfungsi dengan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan finansial.

Hasil observasi penulis saat penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang rumahnya sangat layak bahkan memiliki beberapa unit kendaraan sepeda motor dan mobil juga mendapatkan BST. Hal ini mengindikasikan penyaluran BST di Kelurahan Langgini masih kurang tepat sasaran. Hasil dokumentasi juga menunjukkan bahwa hal ini masih terus terjadi bahkan di tahun 2023 pun masyarakat yang menerima BST juga termasuk keluarga mampu, sehingga evaluasi ini menunjukkan masih adanya faktor penghambat.

Kesimpulan secara global dari hasil rekapitulasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar adalah *“CUKUP BAIK”*. Masyarakat beranggapan nilai bantuan BST ini relatif kecil dan sifatnya hanya mendukung saja dan tidak dapat dijadikan tumpuan ekonomi, sehingga masyarakat yang mendapat BST tidak serta merta langsung terbebas dari kemiskinan. Kebijakan ini sudah efisien, karena saat anggaran turun dari pusat ke daerah lalu dialokasikan ke Kelurahan Langgini, maka dana BST ini akan langsung dibagikan kepada penerima. Akan tetapi, jumlah anggaran yang tersedia untuk program BST ini belum dapat mencakupi untuk membantu seluruh masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Langgini. Setiap masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tapi sudah terdata di DTKS maka akan diprioritaskan untuk diberikan bantuan tahun anggaran selanjutnya. Baik elemen masyarakat maupun pegawai mendukung adanya program bantuan ini. Masih terdapat bantuan yang tidak tepat sasaran, masyarakat

yang tergolong mampu yang memiliki rumah sangat layak huni justru mendapat bantuan, sementara masyarakat yang benar-benar kurang mampu justru tidak mendapat bantuan.

Faktor Penghambat

Minimnya kualitas pendataan

Observasi di lapangan menunjukkan, terdapat masyarakat penerima BST yang mendapatkan dua kali berturut-turut, terdapat masyarakat yang sebelumnya menerima program PKH kembali mendapatkan BST. Terdapat masyarakat golongan ekonomi mampu yang mendapatkan program BST. Ini artinya kualitas pendataan oleh RT dan RW setempat masih sangat rendah.

Menurut Suari dan Giri (2021:23) potensi maladministrasi pada program BST ini paling krusial adalah pada bidang pendataan. Di atas kertas, pembagian BST terlihat terstruktur dan minim celah akan tetapi, kenyataan berkata sebaliknya. Potensi kesalahan dalam penyaluran BST tetap terbuka, sama seperti yang terjadi di pemberian bansos-bansos lain. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, titik rawan penyaluran BST ada di bagian pendataan. Pendataan calon penerima BST rawan dimanipulasi oleh sejumlah oknum pelaksana kebijakan pendistribusian BST ini. Celah juga bisa muncul dari masyarakat sendiri, tak tertutup kemungkinan ada sejumlah oknum warga yang ingin mendapat bantuan lebih dari satu jenis, maka itu verifikasi dan pengawasan harus diperkuat.

Permasalahan mengenai pendataan memang menjadi titik lemah utama. Kebanyakan warga tidak mengetahui kapan dilakukan pendataan. Warga juga tidak mengetahui secara pasti kriteria rumah tangga miskin yang berhak menerima BST. Selain itu, sebagian warga bekerja di luar daerah domisili sebagaimana tertera dalam dokumen kependudukan, sehingga tidak terdaftar atau terdata secara ganda di tempat domisili dan di tempat daerah bekerja. Akibat lemahnya pendataan, sebagai warga yang benar-benar miskin justru tidak terdata. Sehingga untuk mengatasi hal ini penggunaan metode BST menuntut data yang akurat dan terpecaja.

Ketidaktepatan dalam mendata RTS (Rumah Tangga Sasaran), di sebabkan petugas pendata, tidak mematuhi kriteria yang ditetapkan (memenuhi minimal 9 kriteria dari 14 kriteria syarat penerima BST). Data yang tidak valid, menyebabkan kesalahan dalam pembagian dana BST yang seharusnya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, akibatnya sebagian dari warga miskin mengeluhkan kejadian tersebut, karena mereka yang seharusnya masuk dalam daftar RTS (Rumah Tangga Sasaran) tidak mendapat dana bantuan. Pendataan warga perlu dilakukan setiap periodenya, agar sewaktu BST akan dilaksanakan, petugas pendata mendapatkan data valid mengenai jumlah warga miskin yang berhak menerima BST, karena perubahan ekonomi yang terjadi setiap saat dapat menyebabkan taraf hidup warga yang berubah-ubah pula.

Belum efisiennya jumlah dana yang diberikan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat

Hal ini menunjukkan bahwa BST belum efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin karena prioritas utama dari BLT tersebut masih untuk kebutuhan dasar.

Namun BST tersebut memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya BST tidak berpengaruh terhadap kinerja masyarakat miskin karena masyarakat miskin tidak bisa hidup jika hanya menggantungkan pada BST.

Di satu sisi, kebijakan BST ini mungkin akan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin. Jumlah penerima BST (Bantuan Sosial Tunai) di kelurahan langgini menurun, selain itu di tahun 2020 jumlah nominal yang diterima sebesar Rp.1.800.000,-/ orang selama 3 tahap sehingga mendapatkan Rp.600.000,- untuk satu tahap. Sementara itu, saat ini di tahun 2021 jumlah nominal yang diterima hanya sebesar Rp.600.000,-/ orang selama 3 tahap sehingga mendapatkan Rp.200.000,- untuk satu tahap. Dengan pemberian yang hanya sebesar Rp.200.000,- jumlah ini tentu tidak dapat mencukupi kebutuhan selama satu bulan, sehingga masyarakat harus lebih bijak menggunakan dana ini seefisien mungkin misalnya disimpan hanya untuk keperluan dana darurat, sebagai cadangan dana untuk pembelian kebutuhan pokok, dan lain-lain.

Pemberian bantuan terhadap masyarakat miskin merupakan hal yang harus dilakukan pemerintah untuk penentasan masalah kemiskinan agar kesejahteraan masyarakat meningkat namun kenyataan yang terjadi di masyarakat bantuan langsung tunai bukan menjadi jawaban permasalahan kemiskinan di Langgini. Karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya sisi positifnya saja melainkan banyak juga membawa dampak yang negatif sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan langsung tunai itu dianggap belum maksimal dalam membantu perekonomian masyarakat.

Selain itu juga, permasalahan efektifitas dan efisiensi kebijakan ini sangat diragukan. Banyak kelemahan-kelemahan dan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan BST ini, antara lain kebijakan BST bukan kebijakan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan kemiskinan di Langgini, ini dikarenakan kebijakan ini tidak mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin secara langsung. Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana BST yang tidak dapat diukur dan diawasi karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan BST memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat. Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BST kepada masyarakat yang berhak. Peran aktif masyarakat yang kurang/ minim, sehingga optimalisasi kinerja program yang sulit direalisasikan. Dari sisi keuangan negara, kebijakan BST merupakan kebijakan yang bersifat kurang efektif dalam menyerap uang negara karena kebijakan tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak mampu menstimulus produktifitas masyarakat miskin.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Hasil Evaluasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar secara keseluruhan tergolong cukup baik. Masyarakat beranggapan nilai bantuan BST ini relatif kecil dan sifatnya hanya mendukung saja dan tidak dapat dijadikan tumpuan ekonomi, sehingga masyarakat yang mendapat BST tidak serta merta langsung terbebas dari kemiskinan. Kebijakan ini sudah efisien, karena saat anggaran turun dari pusat ke daerah lalu dialokasikan ke Kelurahan Langgini, maka dana BST ini akan

langsung dibagikan kepada penerima. Akan tetapi, jumlah anggaran yang tersedia untuk program BST ini belum dapat mencakupi untuk membantu seluruh masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Langgini. Setiap masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tapi sudah terdata di DTKS maka akan diprioritaskan untuk diberikan bantuan tahun anggaran selanjutnya. Baik elemen masyarakat maupun pegawai mendukung adanya program bantuan ini. Masih terdapat bantuan yang tidak tepat sasaran, masyarakat yang tergolong mampu yang memiliki rumah sangat layak huni justru mendapat bantuan, sementara masyarakat yang benar-benar kurang mampu justru tidak mendapat bantuan.

2. Faktor penghambat kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar terdiri dari minimnya kualitas pendataan dan belum efisiennya jumlah dana yang diberikan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Creswell, J.W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giroth, L. (2004). *Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Andi.
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik. Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Haughton, J., dan Shahidur, R. Khander. (2012). *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hill, Michael., dan Hupe, P. (2008). *Implementing Public Policy: Governance in theory and practice*. London: Sage Publication.
- Hoesein, Umar. (2014). *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartasmita, G. (2003). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Khomsan, dkk. (2015). *Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Andi offset.
- Nugroho, Riant D. (2011). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Setiadi, Elly M., dan Kolip, Usman. (2018). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Soebarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2009). *Filsafat dan Kebijakan dalam Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sulila, Ismet. (2015). *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Edisi 2. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sutrisno, E. (2010). *Budaya organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). *Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan*
- Nadia Aulia Nanda dan Lilis Suriani

Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.

- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lintas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan

Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.

- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.

- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI

MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.

- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan

kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.

- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS*

2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 71). European Alliance for Innovation.

- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.

- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Waluyo. (2017). *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Winarno, Budi. (2008). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dewi, R., Andrianus, H.F. (2021). Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2005-2015. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Vol. 15, No. 2, ISSN: 1693-2617, EISSN: 2528-7613.
- Iqbal, M. (2008). *Potensi Maladministrasi BST di Indonesia*. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10, No. 2, Januari 2008 : 47 – 58
- I Wayan Tagel Winarta., Anak Agung Gede Raka., dan I Made Sumada. (2020). *Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar*. *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik*, 5 (1), 28-42.
- Iping, Baso. (2020). *Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial*. *JMPIS Jurnal*, Vol. 1, Issue 2, E-ISSN:2716-375X, P-ISSN: 2716-3768.
- Maun, Carly Erfly Fernando. (2014). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi*

Masyarakat Miskin Terkena Dampak covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No. 1, Desember 2014.

Nurahmawati, F., dan Hartini, S. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Cibadak. Jurnal Program Mahasiswa Kreatif, Vol. 4, No. 2, ISSN: 2615-8019.*

Nurwati, Nunung. (2008). *Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*". *Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Januari 2008 : 1 – 11*

Regulasi:

BPS. (2021). *Kecamatan Bangkinang Kota Dalam Angka 2021*. BPS Press.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2020 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.

Kompak. 2020. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas Press.